

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W. dan J. Hartono. 2015. *Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) Dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Abdul Halim. 2002. Akuntansi Sektor Publik akuntansi Keuangan Daerah Edisi pertama. Salemba Empat. Jakarta
- Attila, Gyorgy. 2012. "Agency Problems in Public Sector". Diakses pada 18 Juni 2018. <http://anale.steconomieuoradea.ro/volume/2012/n1/101.pdf>.
- Baber, W.R., 1983. "Towards Understanding the Role of Auditing in the Public Sector" Dikutip dalam Laswad, F., Richard Fisher, dan Peter Oyelere. 2005." *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 24, no. 2 : 101-121. Diakses pada 20 Juli 2018. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425404000973>.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun Anggaran 2016. Jayapura : BPK RI Perwakilan Provinsi Papua
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2016. Jayapura : BPK RI Perwakilan Provinsi Papua
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2016. Jayapura : BPK RI Perwakilan Provinsi Papua
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Barru Dalam Angka. Barru : BPS Kabupaten Barru
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Buol Dalam Angka. Buol : BPS Kabupaten Buol
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Buton Selatan Dalam Angka. Buton Selatan : BPS Kabupaten Buton Selatan
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Gorontalo Dalam Angka. Gorontalo : BPS Kabupaten Gorontalo
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka. Hulu Sungai Utara : BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara

- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Jayawijaya Dalam Angka. Jayawijaya : BPS Kabupaten Jayawijaya
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Kaimana Dalam Angka. Kaimana : BPS Kabupaten Kaimana
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka. Kayong Utara : BPS Kabupaten Kayong Utara
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Ketapang Dalam Angka. Ketapang : BPS Kabupaten Ketapang
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Mahakam Hulu Dalam Angka. Mahakam Ulu : BPS Kabupaten Mahakam Ulu
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Mamuju Tengah Dalam Angka. Mamuju Tengah : BPS Kabupaten Mamuju Tengah
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Manokwari Dalam Angka. Manokwari : BPS Kabupaten Manokwari
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Melawi Dalam Angka. Melawi : BPS Kabupaten Melawi
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka. Morowali Utara : BPS Kabupaten Morowali Utara
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Muna Barat Dalam Angka. Muna Barat : BPS Kabupaten Muna Barat
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Nabire Dalam Angka. Nabire : BPS Kabupaten Nabire
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Paser Dalam Angka. Paser : BPS Kabupaten Paser
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Pegunungan Arfak Dalam Angka. Pegunungan Arfak : BPS Kabupaten Pegunungan Arfak
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka. Penajam Paser Utara : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Sekadau Dalam Angka. Sekadau : BPS Kabupaten Sekadau
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Sorong Dalam Angka. Sorong : BPS Kabupaten Sorong

- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Tapin Dalam Angka. Tapin : BPS Kabupaten Tapin
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kabupaten Teluk Wondama Dalam Angka. Teluk Wondama : BPS Kabupaten Teluk Wondama
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Balikpapan Dalam Angka. Balikpapan : BPS Kota Balikpapan
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Gorontalo Dalam Angka. Gorontalo : BPS Kota Gorontalo
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Makassar Dalam Angka. Makassar : BPS Kota Makassar
- Badan Pusat Statistik. 2017. Kota Parepare Dalam Angka. Parepare : BPS Kota Parepare
- Bellver, Ana, dan Daniel Kaufmann. 2005. *Transparenting Transparency : Initial Empirics and Policy Applications*. World Bank Policy Research Working Paper.
- Cárcaba, A., & García, J. (2008). “Determinantes de la divulgación de información contable a través de Internet por parte de los gobiernos locales. *Revista Española de Financiación y Contabilidad*”. Dikutip dalam García-Sánchez, Isabel-María, Isabel Gallego-Álvarez, dan Luis Rodríguez-Domínguez. 2010. “Are Determining Factors of Municipal E-Government Common to a Worldwide Municipal View? An Intra-Country Comparison” *Government Information Quarterly*, vol. 27 : 423-430. Diakses pada 26 Juli 2018.  
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.011>.
- Cresswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage Publications.
- Eriyanto. 2011. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Gudono. 2014. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: BPF.
- Hameed, F. 2005. “*Fiscal Transparency and Economic Outcomes*”. *IMF Working Paper No. 02/225*. Washington: *International Monetary Fund*
- Harnowati, Aatina Izzati Penta. 2017. *Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Hartono, D. Utomo, dan E. Mulyanto. 2010. "Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web". *Jurnal Teknologi Informasi*. Vol. 6, No. 1, pp. 9-21.
- Hennink, M., I. Hutter, dan A. Bailey. 2010. *Qualitative Research Methods*. California: Sage Publications.
- Hermana, Budi., A. Tarigan, H. Medyawati, dan W.Silfianti. 2012."E-Government Implementation in Indonesia: Financial Transparency on the Web". *3rd International Conference on e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning IPEDR*. Vol. 27, pp. 194-199.
- Huwae, Kartini. 2016. Analisis Tingkat Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Tesis*. Magister Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Ingram, Robert W. 1984. "Economic Incentives and the Choice of State Government Accounting Practices". *Journal of Accounting Research*. Vol. 22, No.1, pp. 126-144.
- Insani, Nuansa Gilang. 2017. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website pada Pemerintah Daerah di Sulawesi. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Jensen, Michael C., dan William H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership structure". *Journal of Financial Economics*. V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Kemendagri. 2017. "Pemerintah Daerah Kab/Kota Links". Diakses pada 1 Juni 2018.  
<http://www.kemendagri.go.id/pages/links/pemerintah-daerah-kabkota>.
- Kokino, Ingrid. 2016. "Demo SOLMADAPAR Tuntut DPRD Kalbar Transparan Soal Dana Aspirasi". KALAMANTHANA. Diakses pada 12 Juni 2018.  
<http://www.kalamanthana.com/2016/03/17/demo-solmadapar-tuntut-dprd-kalbar-transparan-soal-dana-aspirasi>
- Lalolo Krina P, Loina. Dra. 2003. Sekretariat Good Public Governance. Bappenas. Indikator Pemerintah : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Diakses pada 21 Juni 2018.  
<https://id.scribd.com/document/25943916/Indikator-Dan-Alat-Ukur-ATP>
- Laswad, F., Richard Fisher, dan Peter Oyelere. 2005. "Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities." *Journal of Accounting and Public Policy*, vol. 24, no. 2 : 101-121. Diakses

pada 20 Juli 2018.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425404000973>

Liestiani, Sigit I. 2010. "Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006" Dikutip dalam Syafitri, Febriyani. 2012. "Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan". Skripsi. Fakultas Ekonomi. Program S1 Ekstensi Akuntansi. Universitas Indonesia. Depok.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Saran *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol. 2, No. 1, pp. 1-17.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.

Martani, Dwi., Debby Fitriyani, dan Annisa. 2014. "Financial and Performance Transparency on the Local Government Websites in Indonesia". *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*. Vol. 60 No.3 Universitas Indonesia, Jakarta

Moon, M. Jae. 2012. "The Evolution of E-Government Among Municipalities: Rhetoric or Reality?". *Public Administration Review*. Vol. 62, No. 4, pp. 424-433.

Nosihana, Ariefia dan Rizal Yaya. 2016. "Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 3, No. 2, pp. 89-104.

Nurhadi. 2017. "Mahasiswa Demo Tuntut Transparansi Anggaran Pemkab Majene Sulbar". *Tribun-Timur.com*. Diakses pada 12 Juni 2018.  
<http://makassar.tribunnews.com/2017/05/22/mahasiswa-demo-tuntut-transparansi-anggaran-pemkab-majene-sulbar>

Nusantari, A. N. 2016. Analisis Determinan Tingkat Transparansi Keuangan dan Pengungkapan Kinerja Website Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus Pulau Jawa). *Skripsi*. Akuntansi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

Pratama, Kadek Aris Dwi, D. S. Sri Werastuti, dan Edy Sujana. 2015. "Pengaruh Kompleksitas Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah". *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol. 3, No. 1, pp. 1-12.

Radar Sorong. 2018. "Ratusan Mahasiswa Demo di Kantor Gubernur". Diakses pada 12 Juni 2018.

<http://www.radarsorong.com/read/2018/04/13/59562/Ratusan-Mahasiswa-Demo-di-Kantor-Gubernur>

- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2003. Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-Government*.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Republik Indonesia. 2012. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SC/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD).
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri13/2006) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rokhimah, Siti. 2017. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis *Website* pada Pemerintah Daerah di Maluku dan Maluku Utara. *Tesis*. Program Studi Magister Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Rudiyanto, Bartolomeus dan Heribertus Purwanugraha. 2015. "Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Pengungkapan Pada Website Pemda". Diakses pada tanggal 25 Juni 2017.  
<http://ejournal.uajy.ac.id/8970/1/JURNAL.pdf>

- Sedarmayanti. (2004). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Setyaningrum, Dyah & Febriyani Syafitri. 2012. “Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Volume 9, No.2 Tahun 2012.
- Soperiyanto, Gatot, dan Restya Aristiani. 2011. “Evaluasi Pengungkapan Laporan Keuangan Daerah di Situs Internet: Studi Pada Pemerintah Daerah di Indonesia”. *Binus Business Review* Vol. 2 No.1 Mei 2011: 192-201.
- Styles, Alan K. dan Mack Tennyson. 2007. “The Accessibility Of Financial Reporting Of U.S. Municipalities On The Street”. *Journal Of Budgeting, Accounting & financial Management*, 19 (1), 56-92.
- Suhardjanto, D., Rusmin, Mandasari, P., Brown, A. 2010. Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence from Indonesian Municipalities. *Penelitian Hibah Publikasi Internasional, LP2M UNS*.
- Suhardjanto, D., Yulianingtyas, R. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Sebelas Maret
- Sumarjo, H. 2010. Pengaruh karakteristik Pemda terhadap kinerja keuangan Pemda. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Syamsul. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemerintah Daerah Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Bukti Empiris pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Tesis*. Magister Sains Akuntansi. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Trenovski, B. 2014. “Improvement of the transparency and accountability through a performance based budget”. *Monitoring Report on The Transparency and Accountability of The Budget Users*, 6-7.